**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MEMBERIKAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP DILIKUIDASINYA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 07 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

***FUNCTION OF DEPOSIT INSURANCE IN GIVING PROVIDERS***

***CUSTOMER'S LEGAL PROTECTION AGAINST THROUGH PT. RURAL BANK (BPR) BASED ON ACT NO. 07 YEAR 2009 ON AMENDMENT TO LAW NUMBER 24 YEAR 2004 CONCERNING DEPOSIT INSURANCE INSTITUTE (LPS)***

**Oleh**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama**  | **Ferry Darmajaya** |
| **Npm** | **139030004** |
| **Konsentrasi**  | **Hukum Perdata**  |

****

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2017**

**ABSTRAK**

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja distribusi pendapatan, dan lain - lain. sasaran ini terus di upayakan untuk di tingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting. Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan di sektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat di lihat pada fungsinya sebagai alat *transmisi* kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat *vital* dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan oleh bank**.** Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional mengalami masalah likuidasi adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengabaikan prinsip kehati - hatian dalam berusaha, di samping faktor penunjang lain, yakni lemahnya pengawasan dari bank Indonesia (BI). Maka, sudah sangat jelas sekali dalam hal ini, diperlukan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagai perlindungan terhadap nasabah perbankan yang dilikuidasi.

Pokok persoalan yang terdapat dalam disertasi ini adalah; Bagaimanakah fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi berdasarkan Undang – Undang No. 07 Tahun 2009?; Bagaimanakah kebijakan hukum, yang dapat diambil oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi berdasarkan Undang – Undang No. 07 Tahun 2009?; Bagaimanakan upaya penyelesaian yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi berdasarkan Undang – Undang No. 07 Tahun 2009?. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah *Deskriftif - analitis,* yang didukung dengan format penelitian hukum normatif, dan pendekatan hukum normatif. Analisis data dilakukan secara *yuridis – kualitatif*, yakni menguraikan makna lebih dalam dari Undang – Undang No. 07 Tahun 2009.

Perlindungan hukum antara nasabah dengan bank dibentuknya LPS ini merupakan amanat dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam hal ini setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang di simpan pada bank yang bersangkutan. Undang – undang ini juga mengamanatkan prinsip kehati - hatian yang mengharuskan pihak bank untuk selalu konsisten dalam melaksankan peratuaran perundang - undangan di bidang perbankan berdasarkan *profesionalisme* dan itikad baik.Tanggung jawab bank terhadap Nasabah Penyimpan atas simpanan yang tidak terpenuhi haknya dari hasil penjualan aset bank dalam hal terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank, berdasarkan Pasal 54 ayat (5) Undang - Undang LPS merupakan tanggung jawab pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal, dengan memperhatikan bentuk hukum bank yang bersangkutan, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, atau jika bank yang bersangkutan dicabut izin usahanya karena kesalahan atau kelalaian Direksi, berdasarkan Pasal 104 Undang - Undang PT. kemudian, upaya hukum terhadap simpanan yang tidak dijamin oleh LPS dalam pembayarannya menunggu proses pencairan aset - aset bank yang dilikuidasi. Tetapi apabila penjualan dan penghimpunan aset bank yang dilikuidasi tidak mencukupi untuk membayar dana simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh LPS, nasabah penyimpan dana dapat mengajukan gugatan kepada pemegang saham lama atau pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal melalui Pengadilan Negeri.

Kata Kunci*: Perlindungan hukum Lembaga Penjamin Simpanan; Likuidasi Bank; Upaya Hukum Nasabah Perbankan*

**ABSTRACT**

*National development requires funding sources are not small in order to achieve the target of economic growth, per capita income, employment income distribution, and others - others. This goal keeps strived for improved quality over time. efforts to improve and strengthen the financial sector, especially the banking industry becomes very important. The banking sector has a very vital role, among others, as a regulator of the lifeblood of the national economy. Smooth flow of money is needed to support economic activity. The condition of the banking sector is healthy and strong is important a target end of policy in the banking sector. The role of the banking sector in development can also be seen in its function as a tool of monetary policy transmission. In addition, banking is a vital tool in conducting payment transactions, both nationally and internationally. Given the importance of this function, the efforts to maintain public confidence. On banks become a very important part to be considered by the bank. One factor that makes the national banking system encountered a problem liquidation is due to the behavior of bank managers and owners who tend to ignore the principle of prudence - carefulness in the business, in addition to other supporting factors, namely the lack of supervision of Bank Indonesia (BI). So, it was very clear in this regard, takes the role of the Deposit Insurance Agency (LPS), as a protection against the liquidated bank customers.*

*The subject matter contained in this dissertation is; How the function of the Deposit Insurance Agency in providing legal protection to customers of PT. Rural Banks (BPR) which was liquidated by Law - Law No. 07 Year 2009 ?; How legal policy, which can be taken by the Deposit Insurance Agency (LPS) against PT. Rural Banks (BPR) which was liquidated by Law - Law No. 07 Year 2009 ?; How is the settlement efforts faced by the Deposit Insurance Agency (LPS) to provide legal protection against PT. Rural Banks (BPR) which was liquidated by Law - Law No. 07 Year 2009 ?. Specifications research used in this dissertation research is descriptive - analytical, which is supported by the format of normative legal research, and normative legal approach. The data were analyzed juridical - qualitative, ie decipher the deeper meaning of the Act - Law No. 07 Year 2009.*

*Legal protection between customers and banks establishment of LPS is a mandate of the Act - Act No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 OF 1998 About Banking, in which case each bank is obliged to ensure public funds are stored at the bank. Act - This law also mandates banking principles - caution that requires the bank to always be consistent in implementing peratuaran law - regulations in the field of banking based on the professionalism and good faith. The responsibility of the bank to the Depositors on deposits which are not being met right from the sale of bank assets in the event of revocation of business licenses and liquidation of the bank, based on Article 54 paragraph (5) of the Constitution - Constitution LPS is the responsibility of existing shareholders who are proven to cause the bank to Bank failing that, taking account of the bank law is concerned, it is his responsibility becomes personal responsibility for the whole, or if the respective bank license has been revoked because of an error or omission of Directors, pursuant to Article 104 of law - law PT. then, a legal action against deposits that are not guaranteed by LPS in the payment pending the disbursement of assets - assets of liquidated banks. But if sales and raising the bank's assets were liquidated are insufficient to pay the funds in customer deposits that are not guaranteed by LPS, depositors may file a lawsuit to existing shareholders or parties that have been set by Bank Indonesia, which proved to cause the bank to a bank fail through Court Country.*

*Keywords: The legal protection the Deposit Insurance Agency; Liquidation Bank; Remedy Customer Banking*